

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK STUDI DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU**

Oleh:

Filya Suniarsi¹⁾, Edi Darmawi²⁾, Bobby Mandala Putra³⁾

¹²³Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim
Tanggal 23-05-2025

Tulisan direvisi
Tanggal 09-06-2025

Tulisa diterima
Kembali tanggal 15-06-2025

Korespondensi penulis

Email : filya.suniarsi@gmail.com

Kontak Seluler:

Abstract

This study aims to determine the implementation of Bengkulu Provincial Regulation Number 4 of 2017 concerning Smoke-Free Areas (KTR), specifically Article 7 paragraphs (1) and (2), within the Secretariat of the Bengkulu Provincial DPRD. This research uses a qualitative method with a case study approach. The policy implementation theory used refers to Merilee S. Grindle's model, which emphasizes two aspects: policy content and implementation context. The results indicate that although regulations are normatively available, their implementation is still suboptimal. Obstacles identified include low levels of compliance, weak internal oversight, the absence of firm sanctions, and a deeply rooted smoking culture in the workplace. Meanwhile, supporting factors such as a clear legal basis and awareness among some employees have begun to develop. The success of policy implementation is greatly influenced by the synergy between policy design and implementation capacity in the field.

Keywords: Policy Implementation, Smoke-Free Areas, Bengkulu DPRD, Regional Regulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2), di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori implementasi kebijakan yang digunakan mengacu pada model Merilee S. Grindle, yang menekankan pada dua aspek: konten kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif regulasi telah tersedia, implementasinya masih belum optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya tingkat kepatuhan, lemahnya pengawasan internal, belum adanya sanksi tegas, serta budaya merokok yang mengakar kuat di lingkungan kerja. Sementara itu, faktor pendukung seperti dasar hukum yang jelas dan kesadaran sebagian pegawai sudah mulai terbentuk. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara desain kebijakan dan kapasitas pelaksanaan di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, DPRD Bengkulu, Peraturan Daerah

Pendahuluan

Perokok aktif dan pasif masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah merespons dengan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat daerah. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017. Namun, dalam praktiknya, penerapan KTR masih menemui tantangan serius, khususnya di lingkungan kerja seperti Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan apa saja faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian adalah di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Informan penelitian meliputi staf bagian umum, Satpol PP, petugas keamanan, cleaning service, dan pegawai sekretariat lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman, serta validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: konten kebijakan dan konteks implementasi, termasuk faktor pendukung dan penghambat.

1. Konten Kebijakan

Pasal 7 Ayat 1 dan 2 dari Perda KTR mewajibkan pimpinan dan penanggung jawab kawasan untuk melaksanakan:

- a. Pengawasan internal terhadap larangan merokok,
- b. Melarang aktivitas merokok,
- c. Menyingkirkan asbak,
- d. Memasang tanda larangan merokok,
- e. Menyediakan area khusus merokok yang terpisah dan berventilasi baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian isi kebijakan telah dipahami oleh pegawai, namun belum sepenuhnya diimplementasikan. Misalnya, sebagian area kantor belum memasang tanda larangan merokok secara konsisten, dan tidak semua ruang kerja bebas dari asbak atau puntung rokok.

2. Konteks Implementasi

a. Faktor Pendukung

- 1) Dasar hukum yang jelas: Perda No. 4 Tahun 2017 memberi legitimasi kuat dalam pelaksanaan KTR.
- 2) Kesadaran sebagian pegawai: Beberapa informan menyatakan bahwa mereka memahami pentingnya lingkungan kerja yang sehat.
- 3) Komitmen pimpinan sebagian unit kerja: Ada unit yang mulai mengawasi dan memberi peringatan secara informal kepada perokok.

b. Faktor Penghambat

- 1) Rendahnya kepatuhan individu: Masih banyak pegawai maupun tamu yang merokok di area kerja, termasuk lorong dan ruang tunggu.
- 2) Minimnya pengawasan: Satpol PP tidak melakukan pengawasan rutin dan tidak

- ada petugas khusus untuk memastikan pelaksanaan KTR.
- 3) Ketidadaan sanksi: Tidak ada mekanisme sanksi formal bagi pelanggar, yang membuat kebijakan kehilangan efek jera.
 - 4) Budaya merokok yang mengakar: Merokok masih dianggap hal yang lumrah, bahkan di area kerja publik.
 - 5) Kurangnya sarana pendukung: Area khusus merokok yang sesuai standar belum tersedia, sehingga pegawai cenderung merokok di sembarang tempat.

3. Respons Pegawai dan Pelaksana

Berdasarkan wawancara, staf umum, Satpol PP, satpam, dan cleaning service umumnya menyadari adanya aturan KTR, namun menyatakan bahwa belum ada pengarahan yang tegas atau pelatihan khusus dari atasan. Cleaning service, misalnya, sering kali menemukan puntung rokok di toilet dan lorong.

Sementara itu, Satpol PP menyatakan tidak ada instruksi khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan pelanggaran KTR di lingkungan DPRD. Hal ini menegaskan adanya celah koordinasi antara regulasi formal dan operasional di lapangan.

4. Efektivitas Implementasi

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi KTR di lingkungan DPRD Provinsi Bengkulu tergolong rendah. Ketidakkonsistenan antara isi kebijakan dan pelaksanaannya menandakan lemahnya kapasitas kelembagaan. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran dan keteladanan dari pimpinan, serta belum adanya insentif atau sanksi yang memadai.

Pembahasan

Implementasi kebijakan publik, menurut Merilee S. Grindle, dipengaruhi oleh dua komponen utama: konten kebijakan (content of policy) dan konteks pelaksanaan (context of implementation). Dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kedua komponen tersebut memiliki peran penting dalam menjelaskan keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan kebijakan di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu.

1. Konten Kebijakan: Ketidaksesuaian Antara Regulasi dan Pelaksanaan

Perda No. 4 Tahun 2017, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2), secara normatif sudah sangat jelas. Kebijakan ini mengatur langkah-langkah preventif dan edukatif untuk menciptakan lingkungan bebas asap rokok. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua ketentuan tersebut diimplementasikan secara utuh. Misalnya, tanda larangan merokok belum terpasang secara merata, area khusus merokok belum disediakan, dan asbak masih ditemukan di beberapa sudut ruangan.

Hal ini mencerminkan adanya *gap* antara substansi regulasi dan tindakan operasional di lapangan. Dalam konteks teori Grindle, kebijakan yang baik secara isi belum tentu efektif apabila tidak diimbangi dengan kapasitas pelaksanaan yang memadai.

2. Konteks Implementasi: Dinamika Sosial dan Budaya yang Menghambat

Konteks implementasi dipengaruhi oleh karakteristik aktor pelaksana, lingkungan institusional, serta budaya organisasi. Penelitian menemukan bahwa beberapa aktor pelaksana (seperti satpam dan Satpol PP) tidak diberikan instruksi teknis untuk menegakkan aturan. Sementara itu, pihak cleaning service kerap menemukan puntung rokok, yang menunjukkan

lemahnya pengawasan dan kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan kerja.

Faktor budaya juga memainkan peran penting. Merokok masih dianggap hal yang wajar di lingkungan kerja, bahkan oleh pejabat tinggi. Budaya permisif ini menghambat upaya sosialisasi dan penegakan aturan, sebagaimana disebutkan oleh Grindle bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh “tingkat resistensi” dari kelompok sasaran kebijakan.

3. Faktor Pendukung yang Belum Maksimal Dimanfaatkan

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya potensi keberhasilan implementasi. Beberapa pegawai menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya KTR, dan secara pribadi mendukung pelaksanaan aturan tersebut. Selain itu, keberadaan dasar hukum yang kuat seharusnya menjadi fondasi untuk mendorong kepatuhan dan pengawasan yang lebih efektif.

Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena tidak adanya mekanisme penghargaan atau sanksi yang tegas, serta minimnya koordinasi antar unit di dalam Sekretariat DPRD.

4. Implementasi Kebijakan Masih Bersifat Simbolik

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan KTR di Sekretariat DPRD Bengkulu masih bersifat *simbolik* – terlihat dari keberadaan Perda, namun tidak tercermin dalam perilaku organisasi maupun individu. Tidak adanya sanksi atau sistem evaluasi berkala menyebabkan kebijakan ini berjalan tanpa arah dan kontrol. Ini sejalan dengan pandangan Grindle bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung pada “apa yang tertulis dalam kebijakan,” tetapi lebih pada bagaimana kebijakan itu diterjemahkan ke

dalam tindakan nyata oleh aktor-aktor di lapangan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Meskipun peraturan sudah disusun dengan jelas dan memuat ketentuan teknis mengenai larangan merokok, pengawasan, serta penyediaan sarana pendukung, implementasinya di lapangan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik.

Beberapa faktor penghambat yang signifikan meliputi lemahnya pengawasan internal, tidak tersedianya area khusus merokok yang sesuai standar, kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggar, serta budaya merokok yang masih melekat di lingkungan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa konten kebijakan belum didukung oleh konteks pelaksanaan yang memadai.

Namun demikian, terdapat pula potensi yang dapat mendorong keberhasilan implementasi, seperti adanya landasan hukum yang kuat, dukungan sebagian pimpinan, serta kesadaran sebagian pegawai mengenai pentingnya lingkungan kerja yang sehat dan bebas asap rokok. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih strategis dan terarah untuk menyinergikan antara isi kebijakan dan kapasitas pelaksanaannya agar tujuan dari Perda KTR dapat benar-benar diwujudkan secara nyata di lingkungan DPRD Provinsi Bengkulu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Sekretariat DPRD, perlu menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kebijakan KTR. SOP ini harus mencakup mekanisme pengawasan rutin, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran, serta sistem pelaporan yang dapat dijalankan secara transparan.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang bahaya merokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok perlu ditingkatkan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan juga pengunjung kantor. Edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat simbolik. Sarana dan prasarana penunjang, seperti tanda larangan merokok yang jelas dan mudah terlihat, penyingkiran asbak dari area kerja, serta penyediaan area merokok khusus yang sesuai standar, juga perlu segera disediakan untuk mendukung perubahan perilaku.

Selanjutnya, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi pelaksana seperti Sekretariat DPRD, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan agar terbentuk tim pengawasan atau satuan tugas yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ini. Terakhir, peran pimpinan lembaga menjadi sangat penting sebagai teladan dalam menegakkan aturan. Pimpinan diharapkan tidak hanya menunjukkan komitmen secara verbal, tetapi juga secara nyata menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari asap rokok.

Daftar Pustaka

Ali, Balgis, and Sumardiyono Sumardiyono. 2019. "Hubungan Antara Merokok Dan Aktifitas Fisik Dengan Prevalensi Hipertensi Di Indonesia." *Smart Medical Journal* 2(1):50–58.

Anon. 2013. "Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg 26(4):1–37.

Apriora, Vinda Dwi, Arni Amir, and Oea Khairsyaf. 2015. "Artikel Penelitian Gambaran Morfologi Spermatozoa Pada Perokok Sedang Di Lingkungan PE Group Yang Datang Ke Bagian Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas." 4(2):425–29.

Area, Universitas Medan. 2022a. "Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Perilaku Merokok Siswa di SMA Negeri 5 Medan Diajukan Oleh : Bernando Petrus Siringo-Ringo Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Medan."

Area, Universitas Medan. 2022b. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kabupaten Deli Serdang Yuli Ajizah Hasibuan Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri K." (7).

Ariasti, Dinar, and Endang Dwi Ningsih. 2020. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Lingkungan Sosial Dengan Perilaku Merokok." *KOSALA : Jurnal Ilmu Kesehatan* 8(1):34–44.

Cendekiawan, Arief. 2021. "Proses Kerja KBL Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Pekanbaru Untuk Meningkatkan Citra." *Skripsi* 1(4639):69.

Deswary, Dwi. 2010. "Kebijakan Penilaian Kinerja Dosen Di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 1(1):1–7. doi: 10.21009/jmp.v1i1.2483.

- Febriansyah SE. 2017. "Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif." *Repository.Unikom.Ac.Id* 2(1):1–80.
- Fischer, Erich M., S. I. Seneviratne, D. Lüthi, and C. Schär. 2007. "Contribution of Land-Atmosphere Coupling to Recent European Summer Heat Waves." *Geophysical Research Letters* 34(6):1–6. doi: 10.1029/2006GL029068.
- ghozali. 2016. "Bab Iii Prosedur Penelitian." *Repositori Universitas Siliwangi* 01(1):1–23.
- Julianto, Pebi. 2021. "Tinjauan Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dikecamatan Sitinjau Laut Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci No 21 Tahun 2019." *Qawwam : The Leader's Writing* 2(1):64–74. doi: 10.32939/qawwam.v2i1.85.
- Kasih, N. AT, and D. Rahmawati. 2019. "Perspektif Kebijakan Lokal Terkait Penyediaan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Mataram." *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan* 1(1):237–46. doi: 10.25105/pwkb.v1i1.5282.
- Kepala LAN. 2013. "Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reform Leader Academy)." 2019.
- Nuzulia, Atina. 1967. "Jenis-Jenis Pendekatan Dalam Studi Kebijakan Sektor Publik." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (180565201031):5–24.
- Permana, Danny, Program Studi, Magister Ilmu, Pemerintahan Fisip, Kabupaten Majalengka, and Pembangunan Bandara Kertajati. 2025. "Analisis Dampak Implementasi Pembangunan Bandara Kertajati Terhadap Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat."
- Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. "濟無No Title No Title No Title." *Journal GEEJ* 7(2):8–26.
- Prakoso, Bayu Aji, Dewi Rostyaningsih, and Aufarul Marom. 2020. "Evaluasi Dampak Pemabnguna Pemabngkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Di Desa." *Journal Of Public Policy And Management Review* 5(2).
- Pritandhari, Meyta. 2016. "Penerapan Komik Strip Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Keuangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro." *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 4(2):1–7. doi: 10.24127/ja.v4i2.631.
- Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes. 2011. "Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok." *Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Putra, Bobby Mandala. 2024. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktik*. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ranjani, Ranjani, Andri Trianfano Trianfano, Alfriansa Agustina Agustina, Doni Agustia Permana, and Inti Novita Sari. 2023. "Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Open Defecation Free (Odf) Di Desa Meri Kabupaten Purbalingga." *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5(2):624–38. doi: 10.14710/dialogue.v5i2.19949.
- Setiawan, Heru Dian. 2017. "Analisis Kebijakan Dalam Mengamankan Pulau Miangas Provinsi Sulawesi Utara." *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2(2):509–24. doi: 10.47313/pjsh.v2i2.343.

- Setiyaningrum, Ninik, and Aloysius Rengga. 2016. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Area Taman Di Kecamatan Tembalang." *Journal of Public Policy and Management Review* 5(2):720–33.
- Setyaningih, Sri. 2019. "Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam Implementasi Kurikulum Pendidikan Guru Sekolah Dasar: Sebuah Studi Kasus Di Universitas Negeri Semarang." *Manajemen Pendidikan* 13(2):62–71. doi: 10.23917/jmp.v13i2.6397.
- Shaluhiyah, Zahroh, Karyono Karyono, and Farid Noor. 2006. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Praktik Merokok Pada Remaja Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Kudus Tahun 2005." *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 1(1):1–8. doi: 10.14710/jPKI.1.1.1-8.
- SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU. 2023. "No Title." *Nucl. Phys.* 13(1):104–16.
- Sundari, Rini, Dinyar Supiadi Widjaya, and Aditya Nugraha. 2015. "Lama Merokok Dan Jumlah Konsumsi Rokok Terhadap Trombosit Pada Laki-Laki Perokok Aktif." *Kesmas: National Public Health Journal* 9(3):257. doi: 10.21109/kesmas.v9i3.692.
- Syifa, Faiza Mahali, and Nurminti Dorlina Simatupang. 2015. "Penggunaan Sempoa Dalam Pengembangan Kemampuan Berhitung Permulaan Anak." *PAUD Teratai* 4(2):1–6.
- Tanujaya, Chesley. 2017. "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein." *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* 2(1):90–95.
- TCSC-IAKMI. 200AD. "TCSC-IAKMI. (2007). Fakta Tembakau Di Indonesia (Pp. 21–22)."
- Yantri, Dami, Welly Sando, and Hayana. 2021. "Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Smpn 07 Pekanbaru Tahun 2020 Dami Yantri, Welly Sando, Hayana Stikes Hang Tuah Pekanbaru." *Ensiklopedia of Journal* 3(2):201–5.

